



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rustam Aripuddin, S.Ag, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. Fahrudin, S.Sos, M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,


Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip 19680217 198903 1 004

Palu, 9 Februari 2023
PIHAK PERTAMA,


RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si
Pembina Tkt I
Nip 19710102 199803 1 012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 UNIT : BIDANG POLITIK
 TAHUN : 2023

No	Sasaran	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Meningkatnya pemahaman Masyarakat terhadap aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	- Persentase Masyarakat yang memahami aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	40%
	I. Tersedianya Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai Politik	- Jumlah Dokumen Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Fasilitasi Partai	5 Dokumen
	- Terlaksananya kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	- Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di	1 Dokumen
	- Meningkatkan Pemahaman Orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	- Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	40 orang
	- Meningkatkan pemahaman Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	- Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	120 org
	- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	- Jumlah Laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	4 laporan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB. KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

I Program Peningkatan peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Rp. 5.019.894.000

APBD

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi Politik.

Rp. 5.019.894.000

- Sub. Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Rp. 3.979.369.700

- Sub. Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Rp. 231.600.800

- Sub. Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Rp. 403.601.000
 - Sub. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah. Rp. 405.322.500
- TOTAL ANGGARAN** Rp. 5.019.894.000

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Dr. FAHRUDIN, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip 19680217 198903 1 004

Palu 9 februari 2023

KEPALA BIDANG POLITIK

RUSTAM ARIPUDDIN, S.Ag, M.Si
Pembina Tkt I
Nip 19710102 199803 1 012